

## **BAB V**

### **SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan temuan dan pembahasan temuan penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa strategi perbaikan mutu di Universitas Pasifik Morotai dalam menetapkan, melaksanakan, melakukan evaluasi dan monitoring belum berjalan dengan lancar sehingga tidak dapat dijadikan patokan untuk tahapan peningkatan standar mutu. Pada tahap penetapan standar, UNIPAS Morotai dalam merencanakan perbaikan mutu telah memiliki standar mutu yang ditetapkan yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Akan tetapi pada penetapan standar secara prosedural lebih terfokus dan terarah pada standar pendidikan seperti kompetensi lulusan, isi pembelajaran, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pembelajaran, pengelolaan pembelajaran, dan pembiayaan pembelajaran. Secara dokumen mutu sudah terdokumentasi dengan baik, walaupun secara keseluruhan belum melibatkan lingkungan eksternal dalam menetapkan standar mutu UNIPAS Morotai. Sejauh ini UNIPAS Morotai belum meningkatkan standar mutu pendidikan tingginya dan masih menggunakan standar lama yang disusun bersama pada saat melakukan benchmark tahun 2018. Padahal dalam rumusan rencana strategi menyebutkan bahwa penetapan standar mutu UNIPAS Morotai harus melibatkan yang paling utama ialah seluruh civitas, alumni, pengguna lulusan, pemerintah daerah, dunia usaha maupun dunia industri, namun strategi ini tidak tampak dilaksanakan.

Pada tahapan pelaksanaan strategi perbaikan mutu, standar proses pembelajaran dan penilaian pembelajaran telah berjalan dengan baik ini karena universitas fokus pada penetapan rencana pada standar pendidikan. Pada standar pembiayaan, universitas tidak memiliki dokumen secara jelas yang mengatur soal pembiayaan universitas atau belum ada SOP yang mengatur aspek pengelolaan keuangan di tingkat program studi maupun fakultas. Sebaliknya pada pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat masih sangat minim dari segi pendanaan juga belum ada secara jelas berapa anggaran yang disebutkan untuk penganggaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kelengkapan dokumen

pelaksanaan perbaikan mutu pada standar pembelajaran dinilai sudah cukup akan tetapi dalam tahap pelaksanaannya belum sepenuhnya dilakukan karena kesesuaian kondisi nyata dengan prosedur pelaksanaan standar belum semua dilaksanakan dengan baik. Sehingga secara keseluruhan pelaksanaan perbaikan mutu belum berjalan optimal mulai dari tingkat universitas, fakultas, sampai program studi.

Pada tahapan Monitoring dan Evaluasi perbaikan mutu yang dilaksanakan setiap akhir semester pada setiap unit kerja (program studi dan fakultas) dibuktikan dengan bukti dokumen dan laporan monev pada LPM. Akan tetapi hasil monev tersebut tidak digunakan untuk upaya tindak lanjut atau memberikan tindakan korektif kepada pihak yang dimonev. Monev yang dilakukan selama ini di UNIPAS Morotai berjalan searah (LPM→ProgramStudi→ LPM→Pimpinan), sehingga tidak adanya umpan balik atau pemberitahuan temuan sebagai kekurangan atau kelebihan kepada pelaksana di tingkat program studi. Dengan demikian, perlu beberapa tindakan agar monitoring dan evaluasi ini dapat berjalan secara berkesinambungan agar aktivitas peningkatan mutu dapat berjalan.

Peningkatan standar yang merupakan upaya tindak lanjut dari hasil monev dalam menentukan apakah perbaikan yang akan dilakukan berupa perbaikan minor atau mayor sehingga segera diperbaiki dan dapat terus ditingkatkan. Faktanya tindak lanjut perbaikan mutu di UNIPAS Morotai dapat dikatakan belum dilaksanakan sepenuhnya karena kegiatan dari penjaminan mutu hanya sampai pada tahap evaluasi dan monitoring. Dampaknya adalah sebagian besar pihak yang dikenai monitoring dan evaluasi tidak mengetahui dimana kekurangan dalam melaksanakan standar mutu yang ditetapkan. Oleh karena itu, tahapan peningkatan standar pendidikan tinggi tidak dapat dilakukannya sebab kurangnya koordinasi. Dari keseluruhan proses siklus PPEPP yang merupakan siklus berulang terus menerus kenyataannya dilakukan satu arah sebagai bagian dari tugas LPM dalam melaksanakan kewajiban penjaminan mutu.

Daya dukung lingkungan internal dan eksternal serta keterlibatan stakeholder dapat menjadi pelengkap dalam implementasi strategi perbaikan mutu, namun berdasarkan temuan keterlibatan stakeholders masih sangat minim dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu strategi mutu di Universitas Pasifik

Irawati Sabban, 2022

**STRATEGI PERBAIKAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI**

**(STUDI KASUS PADA UNIVERSITAS PASIFIK MOROTAI DI MALUKU UTARA)**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Morotai. Analisis SWOT dapat dijadikan sebagai panduan dengan mempertimbangkan sejumlah kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman/tantangan dari lingkungan eksternal dalam memilih alternatif strategi yang tepat untuk peningkatan mutu, sehingga dapat dihasilkan strategi SO, WO, ST, dan WT untuk mencari strategi yang paling tepat untuk setiap kuadran. Berdasarkan pada temuan penelitian dan telaah teori maka output penelitian ini adalah sebuah model perbaikan mutu pendidikan tinggi. Model yang dihasilkan sebagai strategi perbaikan mutu pendidikan tinggi ini adalah dengan menggunakan prosedur 4-D maka dihasilkan model yang dinamakan KASE2F yakni strategi perbaikan mutu perguruan tinggi yang memiliki pondasi koordinasi, adaptasi, sinergi, dalam meningkatkan mutu Pendidikan tinggi secara efektivitas, efisien, dan fleksibel secara berkelanjutan. Sehingga keterlaksanaan proses dan ketercapaian tujuan strategi perbaikan mutu juga bergantung pada tingkat koordinasi, sinergi, dan adaptabilitas dari pimpinan dan seluruh civitas akademika., Secara timbal balik, strategi perbaikan mutu akan saling mempengaruhi mutu perguruan itu sendiri, yang semua itu didorong oleh adanya optimalisasi budaya akademik dan implementasi *university good governance*.

## 5.2 Implikasi

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini maka beberapa implikasi terkait dengan strategi perbaikan mutu di Universitas Pasifik Morotai harus mendapat perhatian konsisten dalam penetapan perbaikan mutu, pelaksanaan perbaikan mutu, evaluasi perbaikan mutu, dan peningkatan standar mutu adalah:

- 1) Jika tahap Penetapan rencana perbaikan mutu belum melibatkan lingkungan internal atau civitas akademik dan lingkungan eksternal maka akan mempengaruhi input, proses dan output universitas. Selain itu budaya akademik sebagai proses dari perbaikan mutu tidak akan terpenuhi.
- 2) Jika tahapan Pelaksanaan rencana perbaikan mutu tidak sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan atau pelaksanaan perbaikan mutu belum berjalan optimal dari tingkat universitas, fakultas, sampai program studi

maka berimplikasi pada proses dan hasil tridharma perguruan tinggi, salah satunya minimnya publikasi ilmiah setiap semester oleh dosen karena beban mengajar yang banyak, minimnya dukungan biaya penelitian, sehingga berdampak pada peningkatan mutu universitas.

- 3) Jika tahapan evaluasi yang dilaksanakan di Universitas Pasifik Morotai dalam bentuk monitoring dan evaluasi yang berjalan satu arah tanpa koordinasi antara pihak yang melakukan monev dan obyek monev atau pihak yang dimonev maka siklus PPEPP tidak terlaksana dengan baik implikasinya adalah perguruan tinggi tidak mampu memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh perguruan tinggi tersebut.
- 4) Jika tahapan peningkatan standar tidak dilakukan dan tidak memenuhi tahapan peningkatan maka implikasinya pada mutu pendidikan tinggi berupa a) lulusan yang tidak berkompentensi, b) pengakuan dari penjaminan mutu eksternal oleh BAN PT atau LAN, c) daya saing perguruan tinggi tersebut.

### 5.3 Rekomendasi

Dari hasil penelitian strategi perbaikan mutu di Universitas Pasifik Morotai, beberapa rekomendasi yang dapat diajukan sebagai berikut.

1. Pihak universitas perlu mengkaji ulang strategi perbaikan mutu yang sudah dilakukan sehingga dapat memfokuskan prioritas utama yang memang diperlukan yaitu dengan melibatkan pengguna lulusan dalam menyusun perencanaan penyelenggaraan pendidikan tinggi.
2. Penetapan dan pelaksanaan perbaikan mutu dapat berjalan terencana dan berkesinambungan maka monitoring-evaluasi serta tindak lanjut, perlu semua pihak dalam memahami sepenuhnya aspek-aspek yang perlu ditingkatkan sehingga terjadi kesinambungan antar periode.
3. Stakeholder harus dilibatkan dalam perencanaan perbaikan mutu universitas, misalnya universitas dapat melakukan survey terhadap kepuasan dan harus menerima masukan perbaikan dari para pemangku